



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 01 Juli 2021

Halaman: 5

DIY Bersiap Terapkan PPKM Darurat

■ DPRD DIY Minta Penegakan Aturan Prokes Lebih Tegas

YOGYA, TRIBUN – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berupaya menekan lonjakan kasus positif Covid-19 di wilayah ini. Salah satunya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan bahwa DIY akan mengikuti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat dari pemerintah pusat.

"Ya harus melaksanakan (PPKM mikro darurat)," terang Sri Sultan usai mengikuti rapat paripurna di DPRD DIY, Rabu (30/6).

Kendati demikian, Sri Sultan belum mendapat arahan khusus dari pemerintah pusat terkait teknis pelaksanaannya nanti. "Ya belum tahu, belum ada keputusan presiden," terang Raja Keraton Yogyakarta ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadamanta Baskara Aji, memberikan bahwa Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan teknis pelaksanaan PPKM darurat pada Kamis (1/7) hari ini. Rencananya, PPKM darurat bakal diterapkan secara nasional mulai 3 Juli 2021.

Sebelumnya, pemerintah pusat juga telah menggelar rapat pembahasan pelaksanaan PPKM mikro darurat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. "Kemungkinan bakal ada PPKM darurat. Kemarin ada rapat, pusat minta masukan gubernur. Banyak gubernur sepakat (dengan PPKM mikro darurat) dan baru akan diputuskan besok (hari ini). Ada data dari presiden," terangnya.

Pemerintah DIY pun akan mematuhi dan berupaya melaksanakan segala keputusan yang ditetapkan pemerintah. Untuk sementara ini, langkah yang dilakukan Penda DIY untuk menekan laju penularan meliputi mengoptimalkan keberadaan Satgas Covid-19 di RT/RW serta menambah seiter dan RS.

Berikut surat Kalangan legislatif provinsi DI Yogyakarta, menyurat Gubernur DIY, Sri Sultan Sultan Hamengku Buwono X terkait wacana pelaksanaan PPKM darurat. Pimpinan dewan meminta agar Penda DIY menegakkan aturan dalam kebijakan PPKM darurat secara ketat.

Menurut pimpinan dewan, hal yang paling penting dalam sebuah aturan adalah terkait penegakannya. "Kami barusan bersurat dengan gubernur atas nama DPRD DIY, kami minta (PPKM darurat) segera diberlakukan tapi yang penting itu penegakannya," jelas Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta, Rabu (30/6).

"Aturan yang ada kalau tidak ditegakkan hanya menjadi seperti di atas kertas saja," tambahnya.

Menurutnya, penegakan aturan dalam PPKM mikro saat ini belum terlalu optimal. Sehingga upaya pengawasan penegakan aturan menjadi hal yang penting.

"Penegakan sangat penting karena masyarakat sekarang ini perlu dibantu, kami minta satgas dan gubernur untuk melakukan penegakan lebih," terangnya.

Pihaknya juga meminta Penda DIY untuk segera menambah kapasitas RS maupun seiter Covid-19 untuk menghadapi lonjakan kasus beberapa hari terakhir ini. "RS sudah diambang batas. Tidak ada pilihan lain, rem darurat harus ditarik," tegasnya. (tro)

CEGAH PENYEBARAN

- Pemerintah DIY bakal menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat dari pemerintah pusat.
- Gubernur DIY masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk penerapannya.
- DPRD DIY meminta penegakan aturan lebih tegas dan optimal.
- Harapannya angka lonjakan Covid-19 bisa ditekan.
- Pemkot Yogyakarta berupaya membatasi mobilitas pegawai negeri sipil di lingkungan Balai Kota.
- Tujuannya untuk menekan penularan COVID-19 yang melonjak dalam kurun waktu satu pekan terakhir.
- Hanya 25 persen pegawai yang masuk kantor.

	Tindak Lanjut
Segera	☐ Untuk Ditanggapi
	☐ Untuk Diketahui
	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala

Ttd

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005